

## **Analisis Kecenderungan Inward Looking pada Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Era Joko Widodo**

**Lailatul Mahmudah<sup>1</sup>, Muhammad Fikrul Umam<sup>2</sup>**

<sup>12</sup>Fakultas Humaniora, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Darussalam Gontor, Jawa Timur, Indonesia

Email: <sup>1</sup>[laila.m.arifin@gmail.com](mailto:laila.m.arifin@gmail.com), <sup>2</sup>[muhammadfikrulumam@unida.gontor.ac.id](mailto:muhammadfikrulumam@unida.gontor.ac.id)

**Abstrak**—Perkembangan kebijakan luar negeri Indonesia di era Joko Widodo memunculkan pandangan terhadap kecenderungan pada sifat inward looking, khususnya terkait pada penekanan kepentingan domestik dalam praktik diplomasi. Permasalahan utama yang diangkat adalah tentang sejauh mana kebijakan luar negeri Indonesia di era Jokowi dapat dikategorikan sebagai inward looking. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis orientasi kebijakan luar negeri Indonesia di era Jokowi dengan menggunakan perspektif inward looking. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, melalui analisis terhadap literatur ilmiah, dokumen resmi pemerintah, serta publikasi yang relevan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia di era Jokowi memiliki kecenderungan inward looking yang kuat, yang tercermin dalam prioritas pada diplomasi ekonomi, perlindungan kepentingan domestik seperti warga negara Indonesia di luar negeri dan sumber daya alam, serta selektivitas keterlibatan dalam forum internasional. Dengan demikian kebijakan luar negeri Indonesia di era Jokowi tidak bersifat isolasionis, melainkan menunjukkan adanya kecenderungan pada sifat *inward looking* dengan terlibatan dalam Internasional yang pragmatis, terukur dan berorientasi pada hasil yang konkret bagi pembangunan nasional.

**Kata Kunci:** Kebijakan luar negeri Indonesia; *Inward Looking*; Diplomasi Ekonomi; Kepentingan Domestik

**Abstract**—During Joko Widodo's presidency, the evolution of Indonesian foreign policy has led to perceptions of an inward-looking inclination, particularly focusing on prioritizing domestic interests within diplomatic practices. The central question explored is the extent to which Indonesia's foreign policy under Jokowi can be classified as inward-looking. This study aims to examine the orientation of Indonesian foreign policy during the Jokowi era through an inward-looking lens. A qualitative approach is employed, utilizing literature review methods to analyze scholarly works, official government documents, and pertinent publications. The findings of this research indicate a notable inward-looking tendency in Indonesia's foreign policy under Jokowi, evident in the emphasis on economic diplomacy, safeguarding domestic concerns such as Indonesian citizens abroad and natural resources, and selective engagement in global forums. Consequently, Indonesia's foreign policy during Jokowi's administration is not isolationist but demonstrates a pragmatic, measured international engagement focused on tangible outcomes for national development.

**Keywords:** Indonesian Foreign Policy; *Inward Looking*; Economic Diplomacy; Domestic Interests

### **1. PENDAHULUAN**

Pembangunan negara sering dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, yang umumnya diukur melalui perubahan tingkat pendapatan nasional dalam bentuk Produk Domestik Bruto (PDB). Banyak dari negara berkembang, belum mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal, termasuk Indonesia. (Klau, 2025) Saat ini, Indonesia dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang bersifat multidimensional, masalah tersebut berasal dalam bidang ekonomi, politik dan sosial. Indonesia pernah merasakan ekonomi stabil pada tingkat 5% ditahun 2023. Namun kestabilan ekonomi tersebut tidak di rasakan oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan, di tambah dengan kesenjangan sosial yang masih tinggi, membuat Indonesia membutuhkan pembangunan domestik yang besar. (Nugroho, 2025)

Setiap pemimpin memiliki cara masing-masing dalam memimpin negaranya. Indonesia mengalami pergeseran orientasi dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), beliau lebih berorientasi pada menjalin hubungan yang baik dengan banyak negara dalam visi “*thousand friends and zero enemy*”, sedangkan pada orientasi Joko Widodo yang mendorong Indonesia untuk bersikap lebih percaya diri lagi dalam politik Internasional, dan lebih berorientasi pada hubungan bilateral tanpa mengubah aturan atau rezim yang ada serta menekankan adanya manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat. (Ardhani, 2018)

Presiden Joko Widodo memiliki gaya kepemimpinan yang khas dan unik, yaitu menarik hati juga simpati masyarakat, salah satunya adalah dengan melakukan perbincangan langsung pada masyarakat juga menampung aspirasi rakyat. Pada masa pemerintahan Jokowi, ia menekankan pada kerjasama yang membuahkan hasil yang konkret seperti membangun infrastruktur dengan bekerjasama dengan China seperti proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) (Ma'arif, 2019), kemudian adanya kerjasama yang dilakukan dengan Singapura, yang menjadikan wilayah Batam, Bintan, dan Karimun sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK), yang membuat ekonomi di daerah Batam, Bintan, dan Karimun meningkat. (Nasir, 2022)

Selain dari pembangunan infrastruktur, di era Joko Widodo muncul banyak permasalahan bagi tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri, mulai dari penganiayaan TKI di Malaysia hingga keterlibatan dalam pembunuhan tokoh politik, hingga kasus kematian TKI secara mengenaskan. (Maksum, 2017) Dengan begitu Jokowi bersama dengan beberapa menteri terkait pekerja migran Indonesia, melakukan adanya perbaikan dalam tata kelola pekerja migran Indonesia, supaya mendapat perlakuan yang baik, mulai dari keberangkatan, sesampainya di negara penempatan, hingga kembali ke tanah air. (Yanwardhana, 2023)

Jika dilihat dari beberapa hasil dan juga prioritas yang dilakukan di era Jokowi, memunculkan pandangan-pandangan bahwasannya kebijakan luar negeri Indonesia mengalami pergeseran orientasi dimana diplomasi tidak lagi semata-mata diposisikan sebagai sarana pencitraan dan kepemimpinan normatif di tingkat global, melainkan untuk mendukung pembangunan domestik. Dari sini menimbulkan adanya anggapan kecenderungan *inward looking* dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Untuk itu artikel ini akan membahas bagaimana kecenderungan *inward looking* tercermin dalam kebijakan luar negeri Indonesia di era Joko Widodo?

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Bungin dalam buku Dr. Abdul Fattah Nasution, M.PD "Metode Penelitian Kualitatif" adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data guna mencapai tujuan dan manfaat tertentu. Pendekatan ilmiah ini didasarkan pada karakteristik keilmuan, yakni bersifat rasional, empiris, dan sistematis. (Nasution, 2023) Pendekatan deskriptif adalah pendekatan yang ada dalam penelitian dengan tujuan untuk menggambarkan setiap fenomena, kejadian atau keadaan secara apa adanya dalam bentuk kata-kata, gambar atau perilaku. (Siti Hanyfah, 2022) Untuk menelaah dan menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami arah dan kecenderungan kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya dalam melihat adanya orientasi *inward looking* yang tercermin dalam prioritas dan praktik diplomasi Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini bersifat sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data tersebut meliputi dokumen resmi pemerintah, pernyataan dan publikasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, serta literatur ilmiah yang didapat melalui berbagai platform daring seperti: ResearchGate, Google Scholar. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan publikasi yang telah di terbitkan sebelumnya berupa jurnal ilmiah, buku, serta media daring lainnya, termasuk situs web resmi, basis data dan sumber informasi elektronik yang relevan dengan topik penelitian.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Inward Looking sebagai Perspektif Analitis Kebijakan Luar Negeri**

Menurut Monthly Current Affairs (2025) definisi dari *Inward Looking* adalah strategi pembangunan suatu negara yang berfokus pada pasar domestik atau keadaan domestik dalam negeri. Strategi ini memprioritaskan pembangunan ekonomi domestik melalui kebijakan yang melindungi industri lokal dan meminimalkan ketergantungan pada pihak eksternal (VisionIAS, 2025). Definisi *inward looking* dalam konteks kebijakan luar negeri adalah strategi yang digunakan oleh suatu negara untuk memperkuat kekuatan domestik sebelum bersaing dalam konteks internasional. (Wargi, 2021) Orientasi ini berimplikasi langsung terhadap program pembangunan nasional dan berfokus pada kepentingan internal.

Kecenderungan *inward looking* dalam kebijakan luar negeri Indonesia di era Presiden Joko Widodo tidak dapat disamakan dengan isolasionisme. Isolasionisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kecenderungan memisahkan diri dari pihak lain, baik dalam konteks internasional maupun domestik. (KBBI, 2026) Sebaliknya, Indonesia di era Jokowi tidak memisahkan diri dari Kerjasama dengan negara-negara lain, melainkan Jokowi lebih aktif menjalin kerjasama, namun dengan penekanan pada kerja sama yang menghasilkan manfaat konkret dan dapat dirasakan dalam jangka waktu relatif singkat oleh masyarakat. Oleh karena itu, fokus utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia di era Jokowi lebih memprioritaskan isu-isu ekonomi dan kepentingan domestik, tanpa mengabaikan keterlibatan internasional. (Albab, 2019) Jadi, Indonesia tetap melakukan kerjasama dengan negara-negara lain sehingga tidak menjadikan Indonesia menganut isolasionisme, namun dalam hal ini hal yang diprioritaskan adalah kepentingan domestik.

Kebijakan luar negeri Indonesia pada pemerintahan Jokowi tetap berlandaskan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Namun, prinsip tersebut ditafsirkan secara lebih fleksibel sesuai dengan visi dan misi pemerintahan, yaitu mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dalam konteks ini, kebebasan dimaknai sebagai kemandirian dalam menentukan kepentingan nasional, sementara keaktifan tercermin dalam pemanfaatan kerjasama internasional secara konstruktif untuk mendukung agenda domestik. (Saputrinta, 2023)

Dalam pemerintahan Jokowi, ia menerapkan kebijakan diplomasi membumi atau bisa disebut dengan *down to earth diplomacy* yang diterapkan dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Diplomasi ini menjadi lebih menarik bagi masyarakat karena Jokowi memprioritaskan 3 hal yaitu: mempertahankan kedaulatan Indonesia, meningkatkan perlindungan bagi warga negara Indonesia, dan memperkuat diplomasi ekonomi. Ketiga hal prioritas tersebut dilihat dari tiga hal lain yaitu: pertama, memperkuat kegiatan diplomasi ekonomi Indonesia dengan adanya keterikatan antara kebijakan pembangunan ekonomi dan juga kebijakan luar negeri; kedua, menjalankan diplomasi bilateral secara aktif; ketiga mempromosikan keunggulan Indonesia dibidang ekonomi. (Andika, 2016) Disini mencerminkan bahwasannya kebijakan luar negeri Indonesia era Jokowi mengarah ke sifat *inward looking* dalam penerapannya.

## **2. Rational Actor Model dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia**

Rational Actor Model (RAM) memandang pengambilan keputusan kebijakan luar negeri sebagai proses rasional yang dilakukan oleh aktor negara dengan mempertimbangkan tujuan, alternatif kebijakan, serta konsekuensi dari setiap pilihan yang tersedia. Dalam kerangka ini, terdapat hal yang harus diidentifikasi, yaitu penilaian seorang pemimpin terhadap isu yang ada dan bagaimana rasionalitas mempengaruhi aktor dalam melihat urgensi dari apa yang mereka hadapi. Terdapat 4 langkah utama dalam proses pengambilan keputusan menurut Rational Actor Model yaitu: mengidentifikasi masalah, menentukan hasil yang diinginkan, mengevaluasi konsekuensi dari suatu kebijakan, dan membuat keputusan yang paling rasional untuk memaksimalkan hasil yang didapat. (University, 2025)

Jokowi melakukan beberapa hal yaitu memprioritaskan perolehan atau keuntungan ekonomi terutama ketika adanya perang tarif antara Amerika dengan China, proteksionisme Trump, yang membuat Indonesia harus bisa untuk menghadapi persaingan di dunia secara global, selanjutnya mengidentifikasi setiap adanya kemungkinan yang terjadi, seperti adanya potensi bagi Indonesia untuk turut berkontribusi dalam sistem produksi internasional, kemudian mengidentifikasi adanya dampak dari strategi Indonesia yang ikut bersaing dalam akumulasi kapital modern, melalui keterbukaan Indonesia dalam menjalin kerjasama dengan negara lain dapat membuka peluang Indonesia untuk mengatur arah keterlibatan ekonomi dan mendapat keuntungan. Selain itu, muncul diplomasi ekonomi sebagai strategi paling relevan, yang membuat Indonesia berpeluang terintegrasi dalam jaringan produksi internasional. (Pattinussa, 2021)

Dari beberapa hal yang diprioritaskan oleh Presiden Jokowi diatas, merupakan hasil dari perhitungan yang rasional terhadap kepentingan nasional dalam konteks global yang dinamis. Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global, termasuk perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok serta meningkatnya proteksionisme, pemerintah Indonesia memilih strategi yang memaksimalkan peluang ekonomi domestik melalui keterlibatan dalam kerjasama

internasional. Dengan demikian, Rational Actor Model menunjukkan bahwa orientasi kebijakan luar negeri Indonesia di era Jokowi bersifat rasional dan sejalan dengan kecenderungan *inward looking*, dimana keputusan diambil berdasarkan perhitungan manfaat langsung bagi kepentingan nasional.

### **3. Prioritas Kepentingan Domestik dalam Kebijakan Luar Negeri Era Jokowi**

Salah satu indikator utama kecenderungan *inward looking* dalam kebijakan luar negeri Indonesia di era Presiden Joko Widodo adalah kuatnya prioritas pada kepentingan domestik. Orientasi ini tercermin dalam kebijakan luar negeri yang diarahkan untuk melindungi dan memperkuat kepentingan internal negara, salah satunya melalui perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang sedang berada di luar negeri, baik yang sedang bekerja ataupun kepentingan lainnya. Pada awal masa pemerintahan Presiden Jokowi, sudah banyak permasalahan dari tenaga migran Republik Indonesia yang berada di negara-negara penempatan, mulai dari yang ada di Malaysia, hingga yang berada di Arab Saudi dan juga tenaga migran Republik Indonesia di negara-negara penempatan lainnya. Permasalahannya selalu berkaitan tentang penganiayaan, pembunuhan, tenaga migran ilegal, gaji yang tidak dibayarkan dan lain sebagainya. Namun, Presiden Jokowi tidak tinggal diam, ia melakukan diplomasi kepada negara-negara terkait, untuk menyelesaikan permasalahan serta menjalin hubungan yang baik untuk membentuk kebijakan atau aturan untuk melindungi para tenaga migran Republik Indonesia di negara-negara penempatan. (Burhanuddin N. A., 2022)

Indonesia telah memiliki beberapa undang-undang yang mengatur tentang perlindungan WNI di luar negeri. Namun, di era Jokowi Kementerian Luar Negeri Indonesia menggantikan pasal yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan terhadap hukum yang mengikat. Pasal tersebut digantikan dengan Undang-undang No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Republik Indonesia. Kemudian, untuk meningkatkan perlindungan WNI di luar negeri, Kementerian Republik Indonesia bekerjasama dengan organisasi regional yang mendukung adanya gerakan perlindungan pada pekerja migran dan perlindungan dari adanya perdagangan manusia yaitu organisasi *Justice Without Border* (JWB). (Rezasyah, 2020) Selain itu, Jokowi juga menekankan sekuritas maritim di perairan Indonesia, karena pada saat itu banyak terjadi penangkapan ikan secara ilegal oleh negara lain yang menyebabkan jumlah populasi ikan yang ada tidak sebanding dengan jumlah ikan yang ditangkap, terutama jenis ikan yang memiliki nilai jual yang tinggi. Di era pemerintahan Jokowi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membentuk satuan khusus yang bertugas untuk memberantas penangkapan ikan secara ilegal atau yang disebut dengan SATGAS 115. SATGAS 115 bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada, bersama para pemangku kebijakan, termasuk didalamnya TNI-AL, Kepolisian, Bakamla dan instansi terkait lainnya. Dalam kisaran 2014-2019 SATGAS 115 dibawah pengawasan KKP berhasil meneggelamkan 556 kapal asing beberapa diantaranya berasal dari Vietnam sebanyak 321 kapal, Filipina 91 kapal, Malaysia 87 kapal, Thailand 24 kapal, China 3 kapal, Papua Nugini 2 kapal dan 1 kapal dari Nigeria dan Belize. Dengan membentuk SATGAS 115 berhasil meminimalisir dominasi kapal asing yang berlayar maupun yang mengambil kekayaan sumber daya laut secara ilegal di perairan Indonesia. (Burhanuddin F. R., 2023)

Kemudian, dalam kepemimpinan Jokowi, salah satu fokus utamanya adalah dengan melakukan diplomasi ekonomi, dan ia berhasil melakukan diplomasi ekonomi yang menghasilkan perluasan akses pasar dalam 27 perjanjian Internasional dan juga menarik investasi asing langsung (FDI) ke Indonesia yang semula di tahun 2014 berjumlah US\$ 28 menjadi US\$ 50 di tahun 2023. Dari sini dapat dilihat bahwasannya diplomasi ekonomi yang dilakukan Jokowi berhasil dilakukan, terutama pada sektor yang strategis seperti energi terbarukan, sektor pangan dan juga kesehatan. Wakil Menteri Luar Negeri pada saat itu, yaitu Pahala Nugraha Mansury mengatakan bahwasannya kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia diimplementasikan secara terukur dengan baik dan berorientasi pada aksi dan hasil. (Dabu, 2024)

Kebijakan luar negeri Indonesia, yang ada pada masa Presiden Joko Widodo menunjukkan bahwa setiap keputusan diambil berdasarkan pertimbangan yang rasional terhadap kepentingan nasional. Kebijakan tersebut difokuskan pada pencapaian manfaat yang konkret bagi masyarakat, sehingga diplomasi diposisikan sebagai instrumen pendukung agenda domestik.

Pendekatan ini mencerminkan penerapan Rational Actor Model yang memperkuat kecenderungan *inward looking* dalam kebijakan luar negeri Indonesia.

#### **4. Pragmatisme dalam Diplomasi Indonesia di Era Jokowi**

Pendekatan diplomatik Indonesia selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang berlangsung dari 2014 hingga 2024, menonjolkan sikap pragmatis, dengan memberikan prioritas pada pertimbangan ekonomi, kemajuan nasional, dan manfaat nyata dibandingkan posisi ideologis. Peralihan ini menandai pergeseran dari kebijakan luar negeri konvensional yang "bebas dan aktif" menuju strategi diplomatik "pro rakyat, pro pertumbuhan dan pro pekerjaan", dengan penekanan yang kuat pada pemenuhan kebutuhan domestik seperti penciptaan lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur. (Damanik, 2025)

Untuk itu, Jokowi fokus dalam kerjasama bilateral untuk memperluas akses pasar dan menarik investasi asing. Setiap adanya kerjasama, Jokowi selalu membawa misi yang besar bagi pedangang besar dengan kontribusi penuh bagi Indonesia dan investor. Adanya pendekatan ini menghasilkan jumlah investasi yang ada, seperti investasi infrastruktur yang dilakukan melalui kerjasama dengan China dan Jepang, yaitu adanya pembangunan jalan tol, pelabuhan dan juga pembangkit listrik. Kemudian, adanya kerjasama teknologi dengan Korea Selatan yang berfokus pada sektor otomotif, elektronik dan juga teknologi digital untuk mendukung transformasi ekonomi Indonesia menuju industri 4.0. (Damanik, 2025)

Dalam forum internasional salah satunya di G20, Jokowi yang menyadari bahwasannya G20 adalah forum yang strategis untuk mencapai kepenringan nasionalnya. Semenjak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, Jokowi tidak pernah absen dalam pertemuan tersebut. Disini Jokowi lebih menekankan pada peningkatan kinerja diplomasi dan perdagangan Indonesia khususnya dalam mendorong ekspor barang non minyak dan memperkuat misi dagang Indonesia di luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa program tersebut dapat disebarluaskan pada tingkat bilateral, regional dan Internasional setelah dikembangkan di bawah kebijakan yang strategis. (Fathun, 2020)

Selain dalam forum G20, Indonesia juga aktif dalam forum Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). Pada tahun 2023 Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutannya di forum KTT APEC. Pada KTT tersebut Presiden Jokowi menawarkan sumber daya yang melimpah baik alam maupun manusia. Saat itu, Jokowi mempromosikan sektor Indonesia untuk membuka peluang bagi investor untuk masuk ke Indonesia, salah satunya di bidang hilirisasi industri. Jokowi memaparkan, sebagai negara penghasil nikel terbesar, Indonesia ingin turut berkontribusi dalam pengembangan transportasi listrik. Kemudian, Presiden Joko Widodo juga turut mengundang bagi para pebisnis yang hadir dalam acara tersebut untuk berinvestasi pada Indonesia (Translation, 2023)

Berdasarkan uraian tersebut, pragmatisme dalam diplomasi Indonesia di era Presiden Joko Widodo mencerminkan kecenderungan *inward looking* yang diterapkan dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Keterlibatan Indonesia dalam kerja sama bilateral maupun forum internasional diarahkan untuk mendukung kepentingan domestik, khususnya peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Dengan demikian, pendekatan pragmatis ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia di era Jokowi berorientasi pada hasil konkret yang memberikan manfaat langsung bagi pembangunan domestik.

#### **5. Selektivitas dalam Keterlibatan Jokowi pada Forum Internasional**

Indonesia turut serta dalam forum internasional di era Jokowi sangatlah selektif, berbeda dengan presiden sebelumnya, dimana pada pemerintahan sebelumnya lebih menekankan pada kebijakan luar negeri yang proaktif sehingga membuat posisi Indonesia menjadi penting dalam lingkungan global. Lain halnya dengan Jokowi, yang lebih menekankan pada kepentingan domestik. Selama dua kali periode dalam masa jabatannya, Jokowi belum pernah hadir secara langsung dalam sidang umum tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dengan ketidakhadirannya Jokowi, sering diartikan sebagai tanda bahwasannya kebijakan luar negeri Indonesia dibawah kepemimpinannya lebih fokus pada hasil yang nyata dari diplomasi ekonomi dan hubungan bilateral dari pada keterlibatannya dalam forum multilateral. Indonesia melewatkan kesempatan untuk memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kebijakan global termasuk reformasi sistem

internasional, perubahan iklim, dan hak asasi manusia dengan ketidak hadirnya Jokowi secara langsung di forum-forum penting seperti Majelis Umum PBB. (Utama, 2024)

Selama KTT G20 2014 di Brisbane, Jokowi secara tegas menyatakan bahwa Indonesia harus mendapatkan manfaat dari Kerjasama yang dilakukan dengan berbagai negara. Dengan kata lain, tujuan kebijakan luar negeri seharusnya adalah mengejar keuntungan. Pandangan ini memengaruhi sikap diplomatik Jokowi, yang lebih mengutamakan bilateralisme dibanding multilateralisme. Jokowi antusias mengadakan diskusi bilateral dengan para perwakilan di berbagai forum global, termasuk G20, APEC, KTT Asia Timur, dan IORA. Hal ini dilakukan untuk menjalin kerja sama dengan tujuan mencapai kesepakatan yang menguntungkan Indonesia. Jokowi melakukan enam belas pertemuan bilateral selama KTT G20 di Osaka, Jepang, pada bulan Juni tahun 2019, Jokowi juga mengadakan pertemuan bilateral dengan lima negara ASEAN selama KTT ASEAN di Thailand. Meskipun banyak topik yang berbeda dibahas dalam pertemuan bilateral ini, namun, isu ekonomi yang paling mendominasi. (Rosyidin, 2019)

Sementara itu, kebijakan luar negeri Jokowi, yang berfokus pada kepentingan rakyat, dibangun atas kemandirian ekonomi. Namun, tidak hanya ekonomi, Jokowi juga memberikan ruang prioritas pada kepentingan budaya Indonesia, khususnya pada nilai-nilai budaya dan nilai kesatuan Republik Indonesia. Posisi Indonesia dalam isu-isu internasional dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri Jokowi. Menjadikan kekhawatiran yang tidak langsung dan tidak nyata bagi Indonesia, tidak lagi menjadi prioritas utama. Namun, yang menjadi prioritas adalah menyanggupi tuntutan domestik, dan kebijakan luar negeri akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga menjadi lebih terorganisir. (Anggita, 2015)

Jika dilihat secara keseluruhan, tidak semua forum Internasional diikuti oleh Jokowi secara langsung. Joko Widodo menunjukkan adanya pergeseran orientasi kebijakan luar negeri Indonesia. Keterlibatan Indonesia dalam forum internasional tidak ditinggalkan, namun Presiden Jokowi lebih menekankan pada kerjasama bilateral untuk mendapatkan potensi yang hasilnya dapat diperoleh bagi kepentingan nasional. Dengan demikian selektivitas dalam keterlibatan Jokowi dalam forum internasional memperkuat kecenderungan *inward looking* dalam kebijakan luar negeri Indonesia.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwasannya kebijakan luar negeri Indonesia di era Presiden Joko Widodo menunjukkan adanya kecenderungan sifat inward looking, terutama dalam orientasi dan prioritas pelaksanaannya. Kecenderungan ini bukan berarti Indonesia menarik diri dari sistem internasional atau bersikap isolasionis, melainkan menempatkan kepentingan domestik sebagai dasar utama dalam menentukan arah, bentuk dan intensitas keterlibatan luar negeri. Diplomasi diposisikan sebagai instrument untuk mendukung pembangunan nasional, khususnya dalam bidang ekonomi, perlindungan warga negara, dan penguatan kedaulatan sumber daya.

Dalam Rational Actor Model menunjukkan bahwa orientasi tersebut merupakan hasil dari perhitungan rasional terhadap dinamika dan ketidakpastian sistem internasional. Keterlibatan Indonesia dalam Kerjasama Internasional dilakukan secara selektif dan pragmatis, dengan menitikberatkan pada manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Diplomasi bilateral yang dilakukan serta memanfaatkan forum-forum Internasional yang strategis seperti G20 dan APEC mencerminkan upaya Indonesia untuk tetap aktif dalam kancah Internasional, namun keterlibatan ini harus terukur dan membuahkan hasil. Dengan demikian, kebijakan luar negeri Indonesia di era Jokowi merepresentasikan penyesuaian strategi yang menegaskan pada kepentingan domestik yang rasional.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Albab, A. W. (2019). Regional, Indonesia di Era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo: Kebijakan Luar Negeri di Tengah Dinamika Lingkungan Strategis. *Politica*, 86.
- Andika, M. T. (2016). An Analysis of Indonesia Foreign Policy Under Jokowi's Pro-People Diplomacy. *Indonesian Perspective*, 6-7.

- Anggita. (2015). *Membaca Orientasi Kebijakan Luar Negeri Jokowi*. Yogyakarta: Balairung Press. Diambil kembali dari Balairung .
- Ardhani, R. A. (2018). Haluan Baru Politik Luar Negeri Indonesia: Perbandingan Diplomasi "Middle Power" Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. *JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL*, 152-153.
- Burhanuddin, F. R. (2023). Implementasi Kebijakan Sekuritisasi Maritim Presiden Jokowi Dalam Menghadapi Aktivitas Ilegal Di Perairan Indonesia. *Jurnal Kemaritiman: Indonesian Journal of Maritime*, 90-92.
- Burhanuddin, N. A. (2022). Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi dan Perjuangan Diplomasi Republik Indonesia . *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 95-101.
- Dabu, P. (2024). *Diplomasi Ekonomi Selama 10 Tahun Jokowi Berhasil Gaet Investasi Asing Hingga US\$50 Miliar*. Indonesia: The Iconomics.
- Damanik, F. R. (2025, November 22). *Pragmatisme dalam Diplomasi Ekonomi Indonesia : Analisis Era Kepemimpinan Jokowi*. Diambil kembali dari Kompasiana: <https://www.kompasiana.com/fatmaramadina4500/6921d2b134777c09393e0502/pragmatisme-dalam-diplomasi-ekonomi-indonesia-analisis-era-kepemimpinan-jokowi>
- Fathun, W. R. (2020). Diplomasi Ekonomi Indonesia Di Dalam Rezim Ekonomi G20 Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo. *Intermestic: Journal of International Studies*, 57-59.
- KBBI. (2026, Januari 07). *Arti Kata "isolasionisme" Menurut KBBI*. Diambil kembali dari KBBI.co.id: <https://kbbi.co.id/arti-kata/isolasionisme>
- Klau, A. D. (2025). *Tantangan Pembangunan Di Indonesia: Analisis dan Solusi*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Ma'arif, S. Y. (2019). Dinamika Hubungan Kerja Sama Indonesia-China di Era Pemerintahan Joko Widodo. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 18.
- Maksum, A. (2017). Kebijakan Pemerintah Jokowi Terkait Teaga Kerja Indonesia Di Malaysia Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Dua Negara Serumpun. *JISIERA: THE JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND INTERNATIONAL RELATIONS*, 40-42.
- Nasir, A. F. (2022). Kerjasama pemerintah Indonesia dan Singapura dalam Pengelolaan Wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Era Joko Widodo-Jusuf Kalla (2015-2019). *Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 122-129.
- Nasution, A. f. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Medan: Harfa Creative.
- Nugroho, R. (2025). Tantangan Kritis Indonesia Terkini: Analisis Sosial, Politik, dan Ekonomi. *Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia*, 3.
- Pattinussa, J. M. (2021). Pengaruh Presiden Joko Widodo pada Penguatan Peran Diplomasi Ekonomi di Indonesia. *Papua Journal of Diplomacy and International Relations* , 100-101.
- Portal, A. (2024). *Kilas Balik 10 Tahun Kepemimpinan Presiden Jokowi, Membanguna Indonesia-Sentris*. Sukoharjo: Sukoharjokab.go.id.
- Rezasyah, T. D. (2020). Upaya Perlindungan WNI oleh Pemerintah Indonesia melalui Pendekatan Diplomasi Digital (2014-2019) . *Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR)* , 109.
- Rosyidin, M. (2019, Oktober 19). *Gaya Diplomasi Jokowi dan Arah Politik Luar Negeri RI*. Diambil kembali dari DetikNwes: <https://news.detik.com/kolom/d-4740964/gaya-diplomasi-jokowi-dan-arah-politik-luar-negeri-ri>
- Saputrinta, D. R. (2023). Analisis Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Era Joko Widodo. *PUTERI HIJAU: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 127.
- Siti Hanyfah, G. R. (2022). Penerapan Metode Kualitatif Deskriptif Untuk Aplikasi Pengolahan Data Pelanggan Pada Car Wash. *Seminar Nasional Riset dan Inovasi Teknologi (SEMNAS RISTEK)* , 340.
- Translation, O. o. (2023). *APEC Summit: President Jokowi Unveils Indonesia's Investment Priority Sectors*. Jakarta: Cabinet Secretariat Of The Republic Of Indonesia.
- University, N. (2025). *5 Key Approaches to Foreign Policy Analysis*. Norwich: Norwich University.
- Utama, V. R. (2024, September 18). *Politik Luar Negeri Jokowi: Satu Dekade Pragmatisme dan Ketergantungan*. Diambil kembali dari DetikNews: <https://news.detik.com/kolom/d-7544386/politik-luar-negeri-jokowi-satu-dekade-pragmatisme-dan-ketergantungan>
- VisionIAS. (2025, Mei 17). *Inward-Looking Development Strategies*. Diambil kembali dari Digital Current Affairs: <https://visionias.in/current-affairs/monthly-magazine/2025-05-17/international-relations/inward-looking-development-strategies#:~:text=Definition:%20Inward%2Dlooking%20development%20strategy,industries%20and%20minimize%20external%20dependencies.>
- Wargi, S. (2021). Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pada Era Jokowi Melalui Diplomasi Ekonomi Dalam Upaya Untuk Menguasai Pasar Halal Dunia. *Indonesian Journal of International Relations*, 321.
- Yanwardhana, E. (2023). *Jokowi Beri Perintah Penempatan TKI Ditangani Lebih Baik*. Indonesia: CNBC Indonesia.